

Urgensi Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Keprofesian

Danil Gusrianto¹, Afriza²

^{1,2} Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: danil.gurianto005@gmail.com¹, afriza@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Lembaga pendidikan dan organisasi profesi memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Struktur organisasi yang baik diperlukan dalam kedua sektor ini untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan pendidikan. Artikel ini membahas struktur organisasi lembaga pendidikan dan organisasi profesi, termasuk pengertian, jenis, tujuan, dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data melalui dokumentasi, analisis deskriptif, penyusunan informasi, evaluasi literatur, dan penyusunan temuan. Pengertian organisasi lembaga pendidikan mencakup struktur yang terorganisir dan terstruktur dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan formal. Jenis organisasi lembaga pendidikan dapat dibagi menjadi formal dan informal. Organisasi profesi keguruan, seperti PGRI, memiliki berbagai tujuan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kompetensi mereka. Artikel ini juga membahas struktur organisasi lembaga pendidikan dan organisasi profesi, serta jenis-jenis dan peran organisasi profesi dalam mendukung guru dan pendidikan. Organisasi profesi seperti PGRI, MGMP, dan ISPI memiliki peran dalam mengembangkan kompetensi guru, memfasilitasi kolaborasi, dan memperjuangkan hak-hak guru. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan fungsi organisasi lembaga pendidikan dan organisasi profesi, dapat meningkatkan sistem pendidikan dan mendukung profesionalisme guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Kata kunci: *Struktur Organisasi, Lembaga Pendidikan, Organisasi Keprofesian*

Abstract

Educational institutions and professional organizations play crucial roles in a country's development. A well-structured organization is essential in both sectors to achieve economic development goals and educational improvement. This article discusses the structure of educational institutions and professional organizations, including their definitions, types, objectives, and functions. The research method used is a literature review, which involves data collection through documentation, descriptive analysis, information compilation, literature evaluation, and findings synthesis. Educational institution organizations include organized and structured frameworks within educational institutions to achieve formal educational objectives. Educational institution organizations can be categorized as formal or informal. Professional teaching organizations like PGRI have various objectives, including enhancing teachers' well-being and improving their competencies. This article also explores the structure of educational institution organizations and professional organizations, along with their types and roles in supporting teachers and education. Professional organizations like PGRI, MGMP, and ISPI play essential roles in developing teachers' competencies, facilitating collaboration, and advocating for teachers' rights. A better understanding of the structure and functions of educational institutions and professional organizations can enhance the education system and support teachers' professionalism in achieving better educational objectives.

Keywords: *Organizational Structure, Educational Institutions, Professional Organizations*

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan dan organisasi profesi merupakan dua aspek yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara (Muhardi, 2004) Kedua sektor ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berpengetahuan, yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bahwa kedua bidang ini memiliki struktur organisasi yang efisien dan efektif.

Dalam konteks pendidikan, struktur organisasi yang efektif membantu mengatur semua elemen penting, termasuk siswa, guru, staf administrasi, dan kepala sekolah. Dengan hierarki yang terdefinisi dengan jelas dan komunikasi yang efisien, lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan lebih lancar. Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam struktur ini adalah kepemimpinan yang kuat dari pimpinan lembaga atau kepala sekolah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing visi dan misi pendidikan serta mengoordinasikan upaya semua pihak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Di sisi lain, organisasi profesi memiliki peran penting dalam mengelola anggotanya yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Susunan struktur organisasi ini mendukung komunikasi dan kerjasama antara anggota, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam profesi tersebut. Selain itu, organisasi profesi juga bertanggung jawab dalam menjaga standar etika dan kualitas dalam bidangnya. Struktur organisasi yang efisien membantu mengembangkan dan menjaga standar-standar ini agar tetap relevan dan terus berkembang. Artikel ini akan membahas secara lebih rinci tentang struktur organisasi dalam konteks lembaga pendidikan dan organisasi profesi, termasuk definisi, jenis, tujuan, dan fungsi dari struktur-struktur tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau riset kepustakaan. Metode ini mencakup pengumpulan berbagai jenis data dan literatur yang diperlukan untuk mendukung tujuan penelitian. Dalam konteks ini, metode Library Research digunakan untuk mengumpulkan informasi dan literatur terkait struktur organisasi lembaga pendidikan dan organisasi keprofesian (Sugiyono, 2021). Berikut adalah beberapa langkah dan teknik yang diterapkan dalam metode ini:

Metode Library Research sangat sesuai untuk penelitian seperti ini, di mana data yang diperlukan dapat ditemukan dalam literatur yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami topik dengan mendalam, menggambarkan berbagai perspektif, dan memberikan wawasan yang kuat tentang struktur organisasi dalam kedua bidang tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Organisasi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Keprofesian

Asal-usul kata "Organisasi" berasal dari bahasa Latin, tepatnya "organum," yang memiliki makna sebagai "alat." (Mesiono, 2010). Selain itu dalam bahasa Inggris, terdapat kata "organize" yang mencerminkan upaya atau tindakan dalam mencapai tujuan tertentu (Tukiman, 2017). Ini menunjukkan bahwa secara etimologis, istilah "organisasi" mengacu pada upaya mengatur atau mengelola sesuatu dengan tujuan tertentu (Imam & Hidayat, 2012). Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai proses pengaturan struktur atau susunan, terutama dalam menempatkan individu-individu dalam sebuah kelompok kerja sama. Hal ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu-individu tersebut dalam hal kewajiban, hak, dan tanggung jawab mereka. Dalam struktur organisasi, kita dapat melihat bagaimana bidang, tugas, dan fungsi dari setiap individu atau unit ditempatkan, serta bagaimana hubungan antara unit-unit tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal (Norlena, 2015).

Menurut J.R. Schermerhorn, organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja bersama dalam pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini menekankan

kolaborasi dan tujuan bersama dalam suatu entitas. Sementara itu, Philip Selznick menggambarkan organisasi sebagai susunan personel yang bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Organisasi dianggap sebagai sebuah kesatuan yang menggabungkan unsur manusia dan unsur non-manusia dengan peran masing-masing dalam mencapai tujuan. Penjelasan yang lebih sederhana dari Smither adalah bahwa organisasi adalah entitas sosial yang memiliki batasan yang jelas, bergerak menuju tujuan tertentu, dan memiliki sistem aktivitas yang terstruktur dengan sengaja. Di sisi lain, Bayle berpendapat bahwa organisasi adalah kumpulan individu yang bekerja sama dalam pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman ini mencakup pandangan organisasi dalam berbagai konteks, mulai dari kepentingan individu hingga masyarakat, komunitas, dan negara. Organisasi, dalam dinamikanya, berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan menggunakan sumber daya dari lingkungan internal. Sebagai sistem terbuka, organisasi mengubah sumber daya manusia dan fisik dari lingkungan menjadi produk dan layanan yang kemudian dikembalikan ke lingkungan untuk digunakan. Proses transformasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun masyarakat dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dengan berbagai bentuknya, organisasi memainkan peran penting dalam dinamika kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat. (Rifa'i, 2019).

Sejalan dengan itu, Purwanto menjelaskan bahwa organisasi melibatkan proses pengaturan struktur, terutama dalam penempatan personel, yang berkaitan dengan hierarki kekuasaan dan tanggung jawab mereka di dalam keseluruhan entitas organisasi (Purwanto, 2005). Susunan dan hierarki kekuasaan serta tanggung jawab ini mempengaruhi bentuk dan ciri keseluruhan organisasi. Hal ini sejalan dengan ayat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4 yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur (Kementerian Agama, 2019)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Surat ini mencerminkan bahwa Allah menyayangi mereka yang ikut serta dalam barisan yang terstruktur, seperti bangunan yang kukuh. Konsep ini relevan dalam membangun organisasi yang kuat, termasuk kesesuaian antara konsep dan pelaksanaan dalam organisasi, solidaritas tim, kemampuan untuk mengukur kekuatan dan mengidentifikasi tantangan, dedikasi dalam bekerja dan berjuang, serta memiliki anggota yang kompeten.

Lembaga adalah badan atau wadah yang memiliki tujuan untuk melakukan usaha, aktivitas, atau penyelidikan keilmuan. Dalam konteks lembaga pendidikan, lembaga ini berperan sebagai wadah untuk membina manusia menuju kedewasaan dan mencapai tujuan pendidikan nasional dengan pengelolaan yang terorganisir dan optimal (Gazali, 2013). Lembaga pendidikan merupakan sebuah badan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia, terutama anak-anak, agar mereka mampu menjalankan peran dan tugas dalam kehidupan sebagai individu atau anggota masyarakat. Pengembangan potensi ini harus dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis guna mencapai tujuan yang spesifik. Pentingnya organisasi dalam lembaga pendidikan sangatlah krusial, dan keberhasilan lembaga pendidikan dapat dinilai berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Cara organisasi lembaga pendidikan ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti jalur pendidikan, tingkat pendidikan, dan jenis lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Dalam konteks tingkat pendidikan, organisasi sekolah dapat divisualisasikan dalam berbagai jenjang, termasuk pra sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Pertama (SLTP/SMP), Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Atas (SMU/SMA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), dan perguruan tinggi. Sementara itu, dalam hal jenis lembaga pendidikan, terdapat dua kategori utama, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Selain itu, lembaga pendidikan juga bisa dibedakan berdasarkan penyelenggaranya, seperti sekolah negeri dan sekolah swasta.

Organisasi dalam lembaga pendidikan merupakan sebuah kerangka di mana tugas-tugas diatur secara terencana dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam lembaga tersebut. Kehadiran struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dalam konteks pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara efisien dan efektif. Pendekatan ini pada akhirnya dapat menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki potensi untuk menciptakan hasil yang positif, yang pada gilirannya mendukung perkembangan masa depan bangsa dan negara. Hal ini juga membantu dalam menciptakan generasi penerus yang bertanggung jawab, memiliki cinta tanah air, dan berakhlak mulia. Dalam organisasi lembaga pendidikan, terdapat individu-individu yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dan membentuk kebijakan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan lembaga pendidikan yang mereka wakili. Kewenangan dan keputusan yang diambil oleh para aktor di dalam organisasi lembaga pendidikan akan memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan atau kemunduran lembaga pendidikan tersebut (Nurmiyanti, 2020).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi dalam konteks lembaga pendidikan adalah penerapan konsep organisasi yang bertujuan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Struktur organisasi lembaga pendidikan merujuk pada tata susunan atau kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisir di dalam lembaga pendidikan, yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Struktur ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan hierarkis antara berbagai elemen atau unit yang ada dalam lembaga pendidikan.

Istilah-istilah seperti Profesi, Profesional, dan Profesionalisme sering digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam tulisan di media, jurnal ilmiah, atau buku teks. Namun, pengertian yang terkandung dalam istilah-istilah ini bisa bervariasi. Terkadang, istilah-istilah ini digunakan untuk merujuk pada pekerjaan yang bersifat tetap. Kata "profesi" sendiri berasal dari bahasa Yunani "pbropbaino," yang memiliki arti tindakan menyatakan secara terbuka atau publik (Puspitasari, 2013). Dalam bahasa Latin, istilah ini dikenal sebagai "professio" dan mengacu pada tindakan di mana seseorang secara terbuka mengumumkan niatnya untuk mengambil suatu jabatan publik. Secara lebih umum, profesi dapat diinterpretasikan sebagai segala jenis pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, mengandalkan pada keahlian khusus. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, profesi merujuk pada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ketaatan terhadap norma-norma sosial yang ketat. Jadi, profesi mencakup jenis pekerjaan yang dianggap sebagai mata pencaharian utama dan bergantung pada kemampuan atau keahlian tertentu. Profesi juga melibatkan jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan individu yang melakukannya untuk memiliki keahlian atau keterampilan yang khusus (Mayasari, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profesi merujuk pada bidang pekerjaan yang mendasarinya adalah pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan atau kejuruan. Konsep ini juga disampaikan oleh Kanter (2011) sebagaimana yang dikutip oleh Amka, yang menjelaskan bahwa Profesi adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang jumlahnya terbatas dan memiliki keahlian khusus. Keahlian tersebut diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman, atau bahkan kombinasi keduanya. Dengan kemampuan khusus ini, mereka mampu memberikan panduan, nasihat, atau layanan kepada orang lain dalam bidang yang merupakan spesialisasi mereka (Amka et al., 2020).

Tilaar menjelaskan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan keahlian dan diperoleh melalui proses pendidikan (Tilaar, 2002). Danim menjelaskan bahwa profesi adalah tipe pekerjaan yang mengharuskan individu yang

melakukannya untuk memiliki pendidikan tinggi, dan ini lebih menekankan pada pekerjaan yang bersifat mental daripada fisik. Kemampuan mental yang dimaksud di sini adalah ketergantungan pada pengetahuan teoretis sebagai alat untuk menjalankan tindakan praktis (Sudarwan Danim, 2012). Nata mengemukakan bahwa profesi adalah deklarasi atau pengakuan terhadap bidang pekerjaan atau sektor pelayanan yang telah dipilih (Nata, 2003). Profesi sering terkait dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang khusus. Contohnya adalah pekerjaan sebagai guru, di mana tugas utamanya adalah memberikan pendidikan, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Jabatan guru dianggap sebagai pekerjaan profesional, yang berarti bahwa pekerjaan tersebut memerlukan keahlian yang khusus (Windiyan et al., 2020).

Oleh karena itu, organisasi profesi dapat dijelaskan sebagai kelompok praktisi yang mengakui diri mereka sebagai profesional dan bersatu untuk menjalankan tugas-tugas sosial yang tidak dapat mereka laksanakan secara individu. Organisasi profesi berperan sebagai wadah di mana para profesional dapat bersatu dan mendapatkan perlindungan.

Dalam pandangan Islam, organisasi profesi mencerminkan pemahaman bahwa organisasi semacam itu adalah penting bagi para praktisi yang mengakui diri mereka sebagai profesional. Dalam Islam, kerjasama dalam bentuk organisasi ini dianjurkan karena dapat membantu para profesional dalam menjalankan tugas-tugas sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara individu. Islam mendorong umatnya untuk berkolaborasi dalam kebaikan dan kesuksesan. Praktisi yang memiliki keahlian khusus, seperti guru, dapat bergabung dalam organisasi profesi untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Surat Al-Maidah, 5:2)

Organisasi profesi, seperti organisasi profesi guru, berfungsi sebagai tempat di mana para profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pendidikan dapat berkumpul. Organisasi profesi juga memiliki peran dalam melindungi hak dan kepentingan para anggotanya, termasuk hak-hak pekerja, penerapan etika dalam profesinya, serta memberikan perlindungan terhadap tekanan atau ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Organisasi profesi juga memiliki peran sebagai alat untuk memberdayakan individu yang memiliki keahlian khusus. Dalam kasus organisasi profesi guru, anggotanya, yaitu para guru, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya:

"Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (Surat Al-Mujadila, 58:11)

Jenis-jenis Organisasi Lembaga Pendidikan

Jenis organisasi lembaga pendidikan mempengaruhi pendekatan pengorganisasian yang mereka terapkan. Pengorganisasian, yang dijelaskan oleh Hicks dan Gullett (1975) sebagaimana dikutip oleh Sagala, adalah sebuah konsep yang melibatkan unsur-unsur birokrasi dan elemen-elemen lainnya (Sagala, 2011). Di sisi lain, menurut Terry,

pengorganisasian merujuk pada kegiatan dasar dalam manajemen yang bertujuan mengatur semua sumber daya yang diperlukan, termasuk unsur manusia, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses (George, R & Rue, 2003). Organisasi lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, seperti yang diuraikan oleh Kurniadin dan Machali (Didin & Iman, 2012):

- a. Organisasi Formal adalah jenis organisasi yang ditandai oleh adanya struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas. Perbedaan utama antara organisasi formal dan informal terletak pada keberadaan struktur organisasi. Struktur organisasi formal digunakan untuk menetapkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab anggota organisasi serta untuk membangun hubungan yang teratur antara individu-individu di berbagai tingkatan. Sebagai contoh, lembaga pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/MA adalah contoh organisasi formal.

Organisasi formal memiliki karakteristik tertentu seperti hubungan hierarkis yang stabil. Hierarki tersebut cenderung tetap dalam berbagai organisasi formal. Struktur organisasi formal juga mengatur hubungan, tanggung jawab, dan komunikasi resmi dalam organisasi. Selain itu, elemen-elemen administratif seperti posisi, hierarki kekuasaan, dan perbedaan antara posisi garis (terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas) dan posisi staf (memberikan dukungan dan saran) adalah bagian integral dari struktur organisasi formal.

- b. Organisasi Informal adalah bentuk organisasi yang melibatkan hubungan yang tidak resmi dan sah yang seringkali terbentuk di antara individu dan kelompok dalam konteks organisasi formal. Menurut Hicks dan Gullett (1975) sebagaimana dikutip oleh (Sagala, 2009). Organisasi informal tidak terikat oleh pengawasan manajemen dan beroperasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan organisasi formal.

Organisasi informal memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi formal, karena sifatnya terkait dengan perilaku, adaptasi, dan kepemimpinan yang bersifat informal. Biasanya, organisasi informal tumbuh karena adanya interaksi yang kuat antara individu-individu di dalam organisasi formal. Interaksi ini menghasilkan norma-norma perilaku yang berbeda, memerlukan penyesuaian diri, dan dapat mengarah pada munculnya kepemimpinan yang informal. Seiring berjalannya waktu, organisasi informal dapat mengembangkan struktur yang kurang terstruktur dan lebih fleksibel. Contohnya kelompok diskusi, kelompok belajar, kelompok studi.

Ada berbagai jenis organisasi, namun dalam analisis yang lebih mendalam, dua kategori utama yang penting untuk dipahami adalah berdasarkan tujuan mereka. (Hidayat & Machali, 2010):

- a. Organisasi profit
Organisasi profit adalah badan atau lembaga yang fokus pada pencapaian keuntungan finansial sebagai tujuan utama. Contohnya meliputi perusahaan, koperasi, dan entitas serupa.
- b. Organisasi non-profit
Organisasi non-profit adalah lembaga atau badan yang tidak didirikan dengan niat utama untuk mencari keuntungan finansial. Jenis organisasi ini mencakup LSM, organisasi masyarakat (ormas), sekolah, pesantren, dan entitas serupa.

Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan

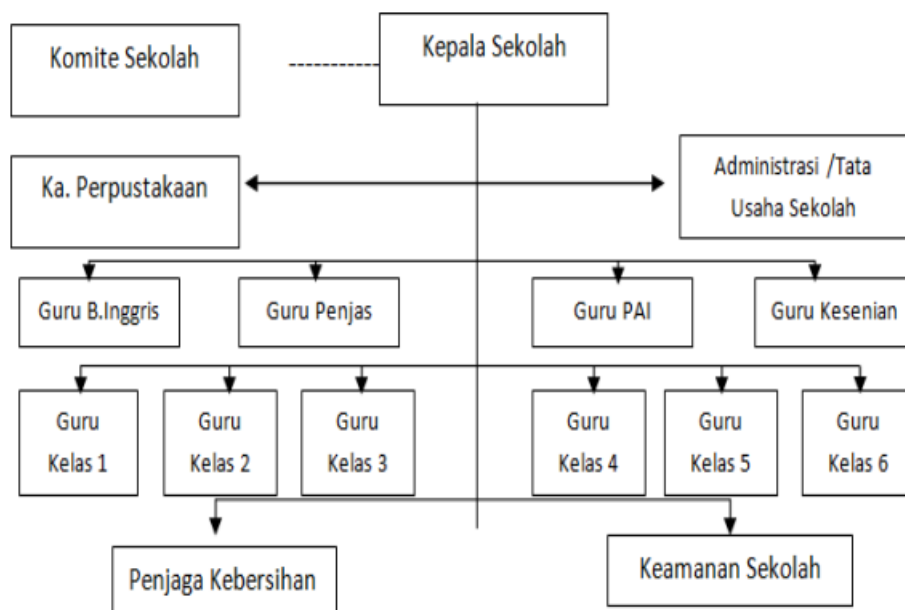
Struktur organisasi dasar dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Selain itu, ada juga struktur campuran yang memiliki tingkat sentralisasi yang bervariasi. Dalam struktur sentralisasi, keputusan dan kontrol pusat dipegang oleh pihak berwenang, dengan sedikit atau tanpa campur tangan dari pemerintah daerah. Semua kebijakan dan instruksi berasal dari pusat, dan sekolah-sekolah hanya menjalankan perintah tanpa banyak inisiatif setempat.

Di sisi lain, dalam struktur desentralisasi, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur segala aspek, termasuk anggaran, kurikulum, dan perekrutan guru. Kepala

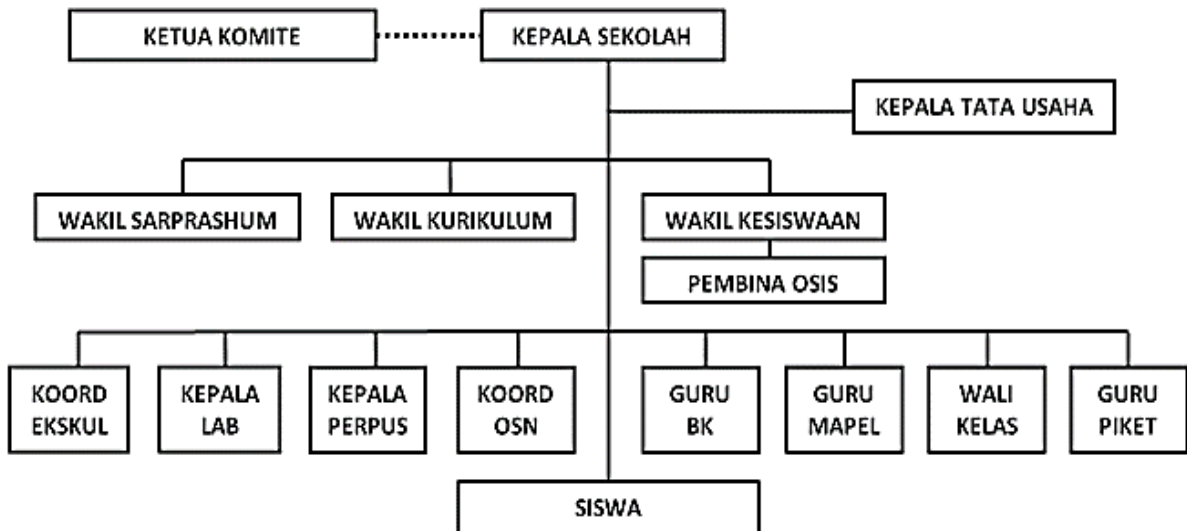
sekolah dalam struktur desentralisasi menjadi pemimpin yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kinerja sekolahnya dan tunduk pada pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kedua struktur ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sentralisasi bisa membuat administrasi menjadi otoriter dan birokratis, sementara desentralisasi bisa menghasilkan keragaman program pendidikan yang sulit diselaraskan. Sebagai solusi, struktur yang ideal adalah campuran dari keduanya, di mana penyelenggaraan dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan negara secara keseluruhan (Fitriyani, 2019).

Struktur organisasi lembaga pendidikan merujuk pada tata letak dan hubungan antarbagian dalam organisasi tersebut, sering kali digambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Struktur organisasi ini berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam unit-unit organisasi di lembaga pendidikan (Sagala, 2009). Struktur organisasi merupakan konsep abstrak yang membutuhkan pembagian tugas yang tepat dalam unit organisasi, termasuk pemberian wewenang yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut. Unit organisasi akan menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Setelah itu, unit organisasi akan memilih tenaga kerja yang cocok untuk mengelola organisasi agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan.

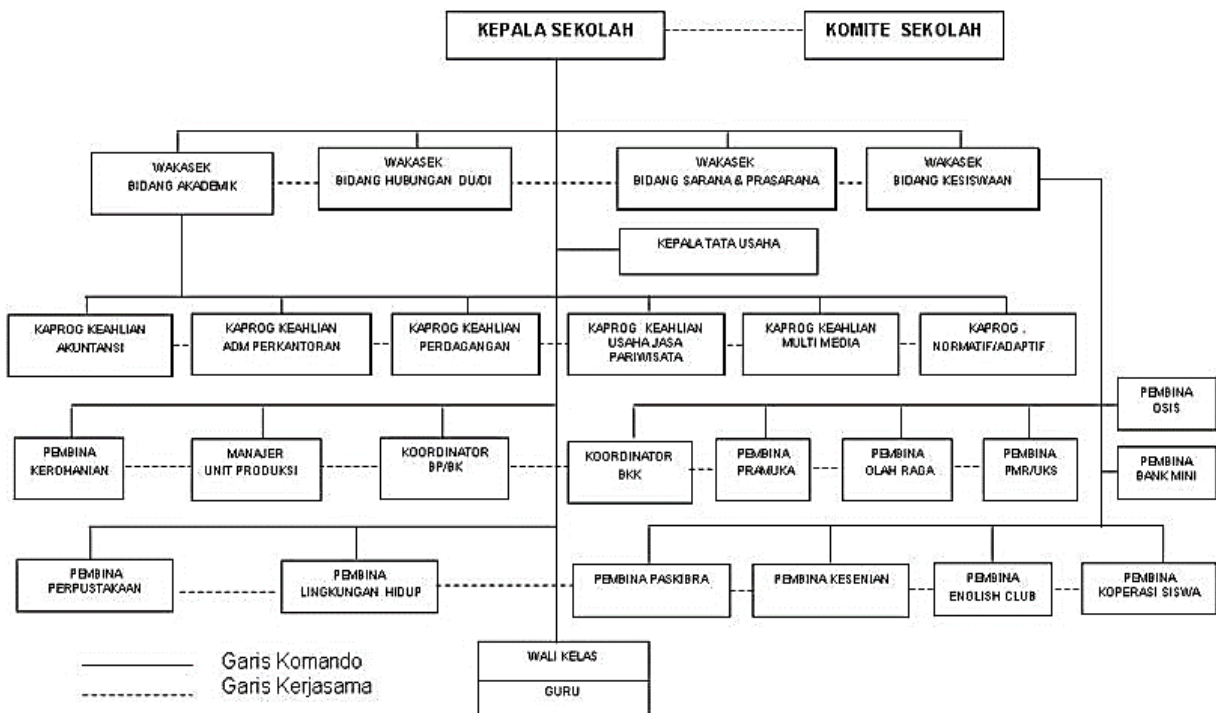
Struktur organisasi yang efektif akan mempengaruhi tindakan individu dan kelompok yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Tindakan dan perilaku mereka akan diarahkan ke arah mencapai tujuan lembaga pendidikan. Struktur organisasi memiliki berbagai pola dan susunan yang beragam, seringkali digambarkan dalam bentuk diagram organisasi (Sagala, 2009). Beberapa contoh struktur organisasi lembaga pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:



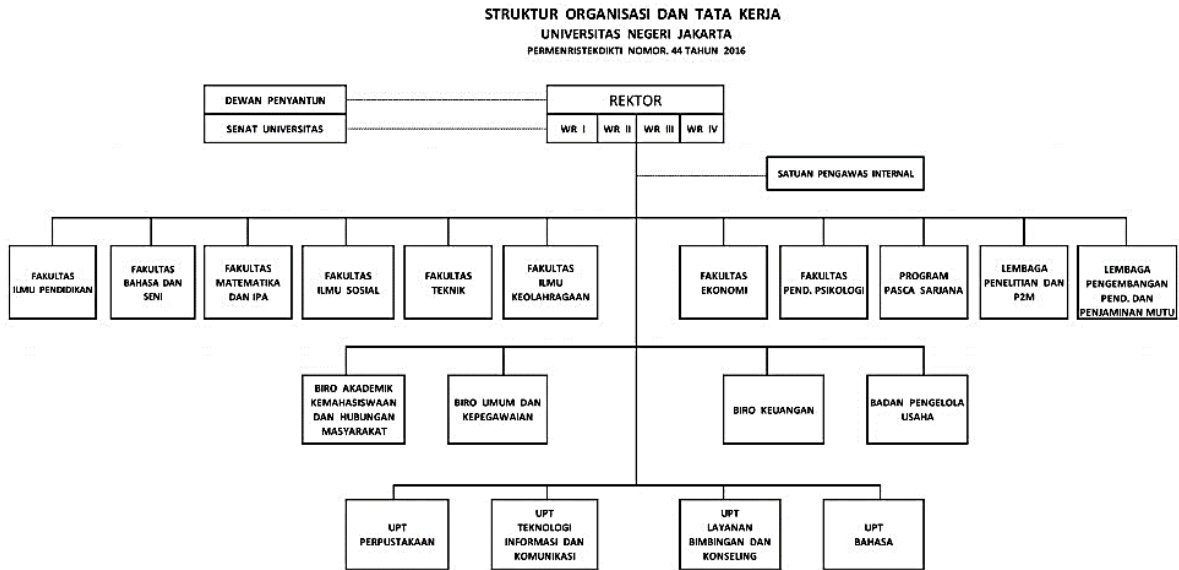
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Jenjang SD/MI



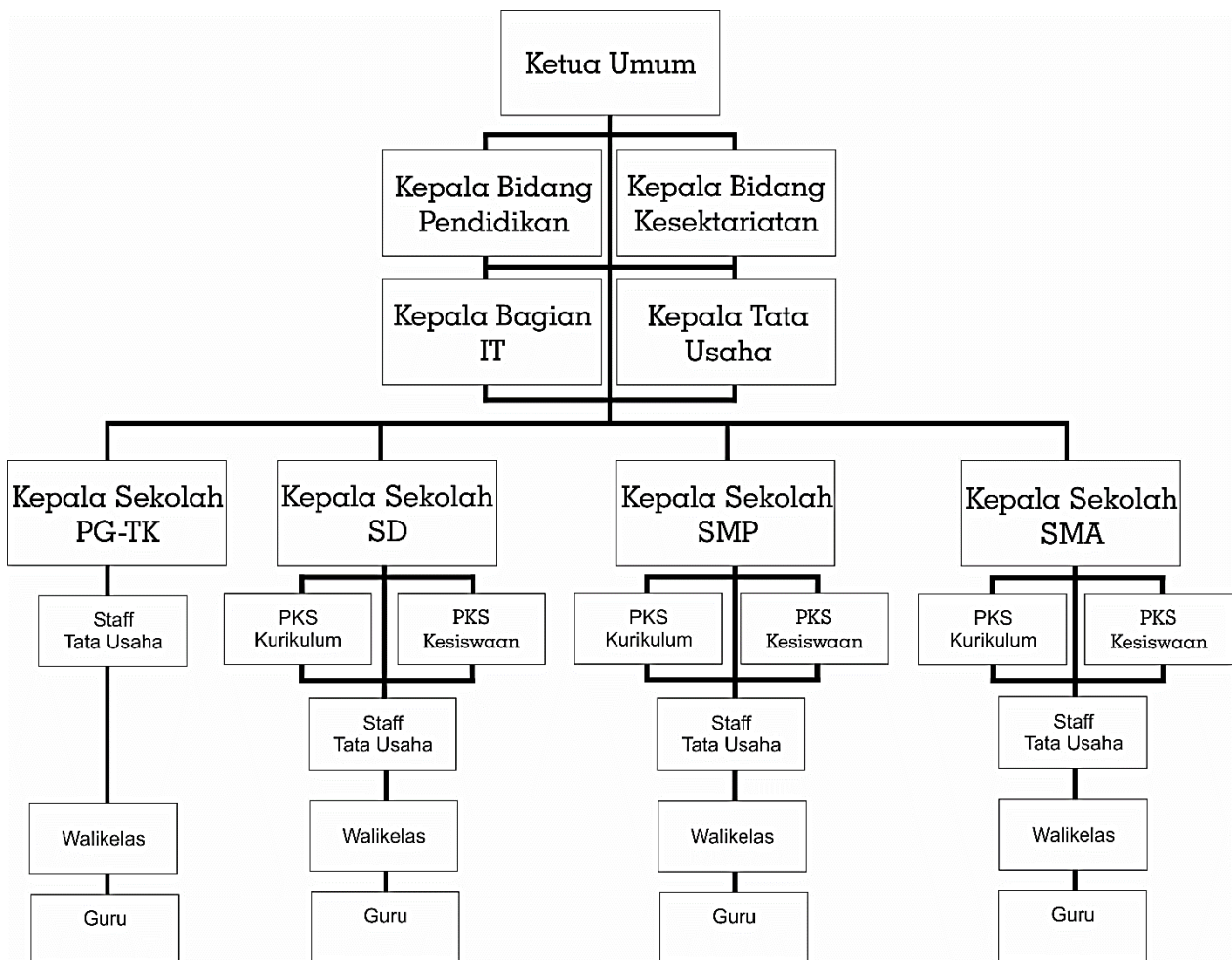
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Jenjang SMP/MTs



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Yayasan

Contoh-contoh susunan struktur organisasi lembaga pendidikan dapat beragam. Sebagai contoh, dalam ilustrasi di atas, terlihat adanya Komite Sekolah yang berada sejajar dengan posisi kepala sekolah, tetapi diwakili dengan garis putus-putus. Komite Sekolah ini adalah entitas independen yang terdiri dari orang tua/wali siswa, anggota masyarakat sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Peran Komite Sekolah sangat relevan dalam mendukung perkembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan.

Tugas-tugas Komite Sekolah melibatkan sejumlah hal, seperti memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan, mengumpulkan dana dan sumber daya dari komunitas, melakukan pemantauan terhadap pelayanan pendidikan, serta mengevaluasi masukan dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan mereka terhadap kinerja sekolah (Permendikbud, 2016). Dengan memiliki struktur organisasi yang terdefiniskan dengan baik dan peran yang jelas, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif dan efisien.

Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan

Organisasi profesi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang ini menyatakan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang sah secara hukum yang dibentuk dan dikelola oleh para guru dengan tujuan meningkatkan profesionalisme mereka (Undang-Undang RI, 2005). Untuk lebih memahaminya, penjelasan lebih rinci dapat ditemukan dalam sumber berikut (Mulyasa, 2005):

a) Pasal 41

- 1) Guru berhak untuk mendirikan organisasi profesi yang berdiri sendiri.
- 2) Tujuan organisasi profesi yang telah disebutkan dalam poin 1) adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, memperbaiki kompetensi mereka, mendukung perkembangan karier, meningkatkan pemahaman tentang pendidikan, memberikan perlindungan terhadap profesi guru, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
- 3) Guru diharuskan menjadi anggota organisasi profesi tersebut.
- 4) Pembentukan organisasi profesi yang disebutkan dalam poin 1) harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan dukungan atau fasilitasi kepada organisasi profesi guru dalam upaya pembinaan dan pengembangan profesi guru.

b) Pasal 42

Organisasi profesi guru memiliki kewenangan:

1. Menetapkan dan mengawasi penerapan kode etik bagi guru-guru.
2. Memberikan dukungan hukum kepada guru jika diperlukan.
3. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan profesi guru.
4. Melakukan program pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Berdasarkan struktur dan perannya, organisasi profesi di bidang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama (Windiyani et al., 2020):

1. Organisasi profesi pendidikan dengan cakupan lokal, seperti Serawak Teachers' Union di Malaysia.
2. Organisasi profesi pendidikan dengan cakupan nasional, sebagai contoh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
3. Organisasi profesi pendidikan dengan cakupan internasional, seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization).

Bentuk organisasi profesi keguruan dapat bervariasi dalam hal tingkat keterkaitan dan hubungan antaranggota. Terdapat empat bentuk organisasi profesi keguruan, yaitu:

1. Organisasi berbentuk persatuan (union), seperti PGRI, Australian Education Union (AUE), Singapore Teachers' Union (STU), Sabah Teachers Union (STU).
2. Organisasi berbentuk federasi (federation), misalnya All India Primary Teachers Federation (AIPTF) dan Bangladesh Teachers' Federation (BTF).
3. Organisasi berbentuk aliansi (alliance), contohnya di Filipina, seperti National Alliance of Teachers and Office Workers (NATOW).
4. Organisasi berbentuk asosiasi (association), seperti All Pakistan Government School Teachers Association (APGSTA) dan Brunei Malay Teachers' Association (BMTA).

Dalam konteks keanggotaannya, organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti (1) tingkat pendidikan tempat anggotanya mengajar (SD, SMP, dll), (2) status penyelenggara lembaga pendidikan tempat mereka bekerja (negeri, swasta), (3) bidang studi keahlian (bahasa, seni, matematika, dll), (4) jenis kelamin (pria, wanita), dan (5) latar belakang etnis (Cina, Tamil, dll), seperti yang terlihat pada China Education Society di Malaysia (Mudlofir, 2013).

Tujuan Organisasi Profesi Pendidikan

Tujuan dari Organisasi Profesi Pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan Profesionalisme: Organisasi profesi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya. Ini melibatkan pengembangan kompetensi, peningkatan keterampilan pengajaran, dan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik terbaik dalam bidang pendidikan.
- b. Mendukung Kesejahteraan Guru: Salah satu tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan profesional pendidikan lainnya. Ini dapat mencakup perjuangan untuk kesejahteraan ekonomi, fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih memadai.
- c. Mengadvokasi Hak-Hak Profesional: Organisasi profesi pendidikan juga berperan dalam mengadvokasi hak-hak profesional anggotanya. Ini mencakup hak-hak seperti perlindungan pekerjaan, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan profesi mereka.
- d. Mengembangkan Standar Etika: Organisasi ini membantu dalam mengembangkan dan menjaga standar etika yang tinggi dalam bidang pendidikan. Ini termasuk prinsip-prinsip moral dan etika yang harus diikuti oleh anggota profesi.
- e. Mengadakan Pelatihan dan Pengembangan: Organisasi profesi pendidikan seringkali menyelenggarakan program pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Ini membantu dalam pembaruan pengetahuan dan praktik pendidikan.
- f. Berpartisipasi dalam Kebijakan Pendidikan: Organisasi ini dapat terlibat dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan memberikan masukan dari perspektif profesional. Mereka berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.
- g. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Salah satu tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini dapat mencakup upaya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih baik, metode pengajaran yang inovatif, dan pemantauan kualitas pendidikan.

Organisasi Profesi Pendidikan memiliki beragam tujuan yang bertujuan untuk mendukung dan memajukan profesi pendidikan, memberikan manfaat bagi anggotanya, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sesuai dengan Pasal 40 Ayat 1 UU RI (UUD RI 1945, 1945), organisasi profesi keguruan memiliki tujuan seperti memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat.

Dalam PP No. 38 tahun 1992, Pasal 61 (Dirjen PMPTK, 2020), terdapat lima misi dan

tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan: (1) karier, (2) kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4) martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Visi umumnya adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional.

Selain itu, organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
3. Memberikan perlindungan profesi guru.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
5. Memajukan pendidikan nasional.

Jenis-Jenis Organisasi Profesi Pendidikan

a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI didirikan pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, organisasi ini bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912, kemudian berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1932. Secara umum, PGRI memiliki tujuan untuk:

- a) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Berperan aktif dalam mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia secara utuh.
- c) Berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional.
- d) Meningkatkan kesadaran dan sikap guru, serta meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- e) Menjaga, memelihara, membela, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota dan kesetiakawanan organisasi.

b. Ikatan Guru Indonesia (IGI)

IGI didirikan pada tanggal 26 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi ini memiliki anggota dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. IGI memiliki moto "Sharing and Growing Together" dan bertujuan mencetak guru independen yang dapat mengubah dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, serta menjadikan guru sebagai lokomotif perubahan di Indonesia.

c. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

PGSI adalah serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dalam politik praktis. PGSI berusaha memperjuangkan kesejahteraan guru swasta dan menciptakan kesetaraan dengan guru PNS dalam hal kesejahteraan dan pengakuan.

d. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

FSGI adalah organisasi profesi guru yang didirikan pada tanggal 17 Januari 2002. Tujuan utama FSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam pengambilan kebijakan pendidikan agar kebijakan tersebut dapat berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, FSGI berperan dalam mewujudkan demokratisasi pendidikan yang harmonis.

e. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Pergunu adalah badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi wadah bagi guru, dosen, dan ustadz. Pergunu mengusung paradigma profesionalisme, independensi, tidak berafiliasi dengan politik, dan sejalan dengan Khittah 1962 yang menunjuk NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

f. Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi)

Pergumapi didirikan pada tanggal 8 Januari 2018 dan menaungi guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mengumpulkan guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulis melalui pendidikan, pelatihan, praktik menulis, dan penerbitan karya

anggota.

- g. **Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia)**

PGM Indonesia adalah organisasi profesi guru madrasah di seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 2008. Tujuannya adalah menciptakan guru yang berkualitas agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. PGM Indonesia mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, pendidikan dan pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan lainnya untuk meningkatkan kualitas guru (Amelia, 2021).
- h. **Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)**

ISPI didirikan pada pertengahan tahun 1960-an dan awalnya bersifat regional. Tujuannya adalah menghimpun sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia, meningkatkan profesionalisme anggotanya, memajukan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang pendidikan.
- i. **Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)**

IPBI didirikan pada tanggal 17 Desember 1975 dan merupakan organisasi profesi kependidikan yang berfokus pada bidang bimbingan. Tujuannya adalah menghimpun petugas bimbingan, mengembangkan ilmu bimbingan, meningkatkan layanan bimbingan, serta berperan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- j. **Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)**

MKKS adalah wadah kerja bagi kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA/SMK. Dalam tingkat SD, kepala sekolah tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). MKKS memiliki struktur kepengurusan di tingkat kabupaten, yang dikenal sebagai MKKS Rayon, serta MKKS Sub Rayon di tingkat yang lebih rendah. MKKS berperan dalam mengkoordinir kegiatan di tingkat kabupaten, termasuk pelaksanaan semester dan kenaikan kelas, serta pengembangan profesi guru. MKKS juga berperan dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga independen dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru.
- k. **Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)**

MGMP adalah forum atau perkumpulan guru mata pelajaran di suatu sanggar, kabupaten/kota, atau kecamatan yang bertujuan untuk berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran, dan berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan perubahan pendidikan di kelas. Tujuan MGMP mencakup memperluas wawasan dan pengetahuan guru, mengembangkan lingkungan kelas yang kondusif, dan membangun kerjasama dengan masyarakat dalam proses pembelajaran. MGMP memiliki peran dalam mengakomodir aspirasi anggotanya, masyarakat, dan siswa, serta dalam mengkoordinasi perubahan yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.
- l. **Kelompok Kerja Guru (KKG)**

KKG adalah kelompok kerja yang melibatkan seluruh guru dalam satu gugus atau sanggar. Tujuan KKG meliputi memfasilitasi kegiatan guru berdasarkan masalah yang dihadapi, memberikan bantuan profesional, meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru, serta meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Semua organisasi ini memiliki peran dan tujuan yang beragam dalam pengembangan pendidikan dan pemberdayaan guru, serta berperan penting dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia.

Fungsi Organisasi Profesi Pendidikan

a. Fungsi Pemersatu

Fungsi ini mencakup dorongan yang mendorong para profesional untuk membentuk organisasi keprofesian. Motivasi ini dapat beragam, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, kultural, dan filosofis mengenai nilai-nilai sistem. Biasanya, motivasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri para profesional untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi mereka, bahkan untuk melaksanakan tugas

mereka dengan baik. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang muncul akibat tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat yang menggunakan jasa profesi tertentu.

Motivasi-motivasi ini juga merupakan tantangan bagi perkembangan profesi. Oleh karena itu, para profesional membentuk organisasi profesi. Melalui organisasi ini, profesi dapat menjadi pemersatu di antara para profesional. Harapannya, organisasi kependidikan memiliki otoritas dan kekuatan untuk menentukan kebijakan dan bertindak bersama-sama, termasuk dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan para praktisi kependidikan dan masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut.

b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional para praktisi kependidikan. Fungsi ini secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 (Dirjen PMPTK, 2020), pasal 61, yang menyatakan bahwa "Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan." Bahkan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pasal 31; ayat 4, disebutkan bahwa "Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa."

Kemampuan profesional yang dimaksud di sini merujuk pada apa yang dikenal sebagai kompetensi, yaitu keterampilan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas di bidang kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional juga berhubungan dengan Kurikulum 1994, yang dapat dilaksanakan melalui dua program, yaitu program terstruktur dan program tidak terstruktur. Program terstruktur adalah program yang memiliki rencana yang terorganisir dengan baik, dengan bahan dan produk pembelajaran yang dapat diakreditasi secara akademik dengan jumlah SKS tertentu. Sementara itu, program tidak terstruktur adalah program yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Dalam program ini termasuk pelatihan tingkat nasional dan regional, supervisi oleh pejabat terkait, pembinaan dan pengembangan kolega, serta pembinaan dan pengembangan individual.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Organisasi lembaga pendidikan di dalam satuan pendidikan mengacu pada susunan skema atau diagram yang menghubungkan berbagai elemen atau bagian lembaga pendidikan. Pentingnya memiliki organisasi lembaga pendidikan yang terstruktur dengan baik adalah untuk mencapai koordinasi tugas dan tanggung jawab yang efektif dalam dunia pendidikan, sehingga memungkinkan pembagian tugas yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara resmi di lembaga pendidikan.
2. Organisasi lembaga pendidikan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Organisasi Formal dan Organisasi Informal.
3. Struktur organisasi lembaga pendidikan merupakan elemen penting dalam organisasi lembaga pendidikan. Struktur ini biasanya dijelaskan dalam bentuk diagram atau bagan organisasi yang menunjukkan hierarki dan hubungan antar bagian atau unit di dalam lembaga pendidikan.
4. Organisasi profesi keguruan, seperti PGRI, memiliki berbagai tujuan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kompetensi mereka.
5. Organisasi profesi seperti PGRI, MGMP, dan ISPI berperan dalam mengembangkan kompetensi guru, memfasilitasi kolaborasi, dan memperjuangkan hak-hak guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2021). Organisasi Profesi Guru Sebagai. In *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Amka, Mastur, & Najamudin, M. (2020). Buku Ajar: Profesi Kependidikan (Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Nizamia Learning Center.
- Didin, K., & Iman, M. (2012). *Manajemen Pendidikan. Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Dirjen PMPTK. (2020). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000*.
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh*, 17(02), 61–80. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.105>
- Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Ta'bid*, Vol.6 No.1.
- George, R., T., & Rue, L. W. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2010). *Pengelolaan Pendidikan konsep, Prinsip dan aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Pustaka Eduka.
- Imam, M., & Hidayat, A. (2012). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktek*.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mayasari, R. S. (2016). Bahan Ajar Profesi Pendidikan. In *Bahan Ajar* (Vol. 1). https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/5291/Diktat_Profesi_kependidikan.pdf?sequence=1
- Mesiono. (2010). *Manajemen dan Organisasi*. Citapustaka Media Perintis.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & J, S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mudlofir, A. (2013). *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhardi, M. (2004). Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(4), 478–492. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/153>
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nata, A. (2003). *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Norlena, I. (2015). Sekolah Sebagai Organisasi Formal (Hubungan Antar Struktur). *Tarbiyah Islamiyah*, 5(2), 43–55.
- Nurmiyanti, L. (2020). *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada.
- Permendikbud. (2016). *Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*.
- Purwanto, M. N. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Puspitasari, E. (2013). Profesionalisme Guru Ekonomi Dan Inovasi Pembelajaran. *EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 1–20.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen Organisasi Pendidikan. In *CV. Humanis* (Vol. 53). CV. Humanis.
- Sagala, S. (2009). *Memahami Organisasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Sagala, S. (2011). *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan : Pemberdayaan guru, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam manajemen sekolah*. Alfabeta.
- Sudarwan Danim. (2012). *Pengembangan Profesi Guru. Dari Pra Jabatan, Induksi Ke Profesional Madani*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tilaar, H. A. . (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- Tukiman, T. (2017). *Analisis Organisasi Dan Pola-Pola Pendidikan*.

- Undang-Undang RI. (2005). *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ayat (1) Bab I ketentuan umum tentang Guru dan Dosen.*
- UUD RI 1945. (1945). *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.*
- Windiyani, T., Kurnia, D., & Purnamasari, R. (2020). *Profesi Kependidikan: Kanjian Konsep, Aturan, dan Fakta Keguruan.*